



Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Kancab Pialang
Berjangka Nasibmu Kini**

**IsDB Grup Dukung Bursa
Timah BKDI US\$ 50 juta**

**SRG Ujung Tombak
AKSI Pangan**

**Dana TA
Berpeluang Besar
Masuk PBK**



BERITA UTAMA | 04



Dana TA Berpeluang Besar Masuk PBK

Perka Bappebti No. 1 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Perdagangan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka menyediakan ruang investasi dari dana pengampunan pajak- tax amnesty- TA.

PASAR FISIK

Jelang Ramadhan
**Pasokan Aman Harga Komoditi
Pangan Cenderung Stabil**

07



PASAR

**Royalti Timah BKDI
Capai US\$ 117,8 juta**

10



BERJANGKA | 06

**Kancab Pialang Berjangka
Nasibmu Kini**

RESI GUDANG | 12

**SRG Ujung Tombak
AKSI Pangan**

AKTUALITA | 16

**IsDB Grup Dukung Bursa
Timah BKDI US\$ 50 juta**

ANALISA | 18

**Akindo Prediksi Harga Kedelai
Stabil Selama 2017**

KOLOM | 24

Jelang Ramadhan
Pelaku Usaha Proaktif Hedging

KIPRAH

Rita Sagita
From Loser to Winner

26





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab

Bachrul Chairri

Redaktur

Nusa Eka

Penyunting/ Editor

Fajarini Puntodewi
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer

Gita Regina
Leli Wulandari

Sekretaris

Katimin

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti

Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat



Bappebti Kementerian Perdagangan



@InfoBappebti



@Bappebti

Redaksi menerima artikel ataupun
opini dikirim lengkap dengan identitas
serta foto ke E-mail:
humas.bappebti@kemendag.go.id



Kepala Bappebti, Bachrul Chairri, memimpin pertemuan monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK. Pertemuan ini dihadiri bursa berjangka dan lembaga kliring.

Jelang ramadhan 2017 dan Idul Fitri 1438 H, Bappebti mendapat penugasan dari Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, untuk memantau ketersediaan pasokan dan harga pangan ke di dua provinsi, yakni DI Yogyakarta dan Papua Barat. Tujuannya, untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga komoditi pangan.

Di dua provinsi tersebut, Kepala Bappebti, Bachrul Chairri, selain meninjau pasar tradisional dan modern, juga melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Kesempatan itu juga digunakan sosialisasi Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

Kebijakan itu wajib dipatuhi pelaku usaha distributor, subdistributor dan agen sembako agar memudahkan pemerintah memantau stok dan mengendalikan harga. Di samping itu, pelaku usaha berkewajiban melaporkan mengenai jumlah, harga, dan ke mana saja bahan pokok disalurkan.

Terbitnya Perka Bappebti No. 1 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka dalam Rangka Mendukung Undang-undang Pengampunan Pajak, juga menjadi pilihan laporan Redaksi pada edisi ini. Sebab, ada sebanyak Rp 147 triliun dana pengampunan pajak yang berasal dari luar negeri berpotensi untuk dikelola diindustri

perdagangan berjangka komoditi.

Menurut pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi kepada **Buletin Bappebti**, terbitnya Perka Bappebti No. 1 Tahun 2017, menjadi peluang tersendiri bagi industri perdagangan berjangka komoditi. Selain menjadikan bursa berjangka sebagai acuan harga komoditi, dari hitung-hitungan bisnis juga menguntungkan baik pemilik dana **tax amnesty** maupun perusahaan pialang berjangka.

Namun, kunci sukses industri perdagangan berjangka komoditi dapat mengelola dana **tax amnesty** terletak pada determinasi pelaku usaha memahami ketentuan yang ada dan meyakinkan pemilik modal.

Tak kalah menarik, Redaksi juga menyajikan evaluasi transaksi komoditi timah di Bursa Timah BKDI di tahun 2016. Diketahui, hingga tahun 2016 setoran royalty atas perdagangan timah ke negara telah lebih dari US\$ 117,8 juta atau lebih dari Rp 1,52 triliun (dengan nilai tukar Rp 13.000 per dolar Amerika). Sementara itu, ekspor timah hasil perdagangan di BKDI di tahun 2016 mencapai US\$ 1,141 miliar dengan volume transaksi sebesar 63.193,64 metrik ton. Nilai perdagangan timah di tahun 2016 mencapai US\$ 1,154 miliar. Sedangkan total volume perdagangan timah mencapai 67.563,20 metrik ton.

Salam



Dana TA Berpeluang Besar Masuk PBK



Perka Bappebti No. 1 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Perdagangan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka menyediakan ruang investasi dari dana pengampunan pajak- (tax amnesty)- TA.

Akhir Maret 2017, lalu, Kementerian Keuangan resmi merilis dana yang masuk ke wilayah Indonesia dari kebijakan repatriasi mencapai Rp 147 triliun. Dengan keluarnya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti No. 1 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka dalam Rangka Mendukung Undang-undang Pengampunan Pajak, menjadi pintu masuk dana repatriasi ke industri perdagangan berjangka komoditi.

Keluarnya Perka Bappebti No. 1

Tahun 2017, itu, merupakan respon dari Permenkeu No. 123/PMK.08/2016, tentang tata cara pengalihan harta wajib lapor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak. Di Pasal 6 Ayat 2 huruf J, kebijakan Kementerian Keuangan itu, menetapkan industri perdagangan berjangka komoditi menjadi salah satu sarana pengelolaan dana repatriasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto

Lukita, dalam keterangannya kepada media terkait keluarnya Perka Bappebti No. 1 Tahun 2017, mengatakan, adanya arus dana dari program pengampunan pajak yang masuk kembali ke Indonesia memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai alternatif investasi.

"Kebijakan Bappebti itu menjadi salah satu instrumen pilihan untuk menyimpan dan mengembangkan dana dari luar negeri yang telah dibawanya ke Indonesia. Kebijakan itu pun mengatur pelaksanaan dan pengawasan transaksi kontrak berjangka komoditi sehingga memberikan jaminan keamanan investasi," terang Enggartiasto.

Pokok Perka

Dalam Perka No. 1 Tahun 2017, itu, Kepala Bappebti menetapkan beberapa pokok peraturan, yakni, pertama, pelaksanaan transaksi kontrak berjangka komoditi. Kedua, persyaratan yang wajib dipenuhi pialang berjangka untuk penerimaan dana nasabah yang bersumber dari dana repatriasi.

Ketiga, tata cara penetapan dan kewajiban pialang berjangka. Keempat, pengaturan dokumen yang wajib diminta pialang berjangka dalam proses pembukaan rekening nasabah. Kelima, pengaturan pengelolaan dana nasabah oleh pialang berjangka yang mengatur pialang berjangka wajib membuka rekening terpisah di bank persepsi sebagai *gateway* yang telah ditunjuk pemerintah.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan, nilai dana yang tersimpan di rekening terpisah di bank penyimpan margin, wajib dilaporkan posisi investasi nasabah kepada bank persepsi setiap bulan. "Selain itu, pialang berjangka wajib menempatkan 100 % dana nasabah pada lembaga kliring berjangka dan wajib membuka rekening terpisah khusus untuk penempatan margin dana nasabah dalam rangka pengampunan pajak," katanya.

Menurut Sri Hariyati, bank penyimpan margin yang juga menjadi bank persepsi



seperti ditetapkan Kementerian Keuangan ada empat bank. Masing-masing, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

"Hal lain yang penting dari Perka Bappebti itu adalah bahwa transaksi yang diizinkan hanya pada kontrak berjangka komoditi yang ada di bursa berjangka. Jadi untuk kontrak yang termasuk dalam kelompok sistem perdagangan alternatif-SPA dan penyaluran amanat ke bursa luar negeri- PALN, tidak diizinkan," tegas Sri Hariyati.

Peluang

Dirut PT Jalatama Berjangka, Jacob Ongkowidjojo, memandang keluarnya Perka No. 1 Tahun 2017, merupakan peluang tersendiri bagi industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Di satu sisi kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan bursa berjangka dapat di ekspos lebih luas kepada perusahaan pialang berjangka dan masyarakat, sehingga likuiditasnya semakin tinggi dan bursa berjangka menjadi referensi harga komoditi.

"Jujur saja, dengan adanya Perka

Bappebti No. 1 Tahun 2017, itu, menjadi peluang besar bagi industri perdagangan berjangka komoditi. Setidaknya sampai saat ini saya melihat ada dua keuntungan dari kebijakan itu bagi pelaku pasar," jelas Jacob Ongkowidjojo kepada **Buletin Bappebti**, baru-baru ini.

Yang pertama, kata Jacob lebih jauh, tarif perdagangan relatif kecil dibandingkan dengan kontrak berjangka bilateral. "Kita ambil contoh, biaya transaksi untuk 1 lot kontrak berkala emas 5 gram di Bursa Berjangka Jakarta- BBJ, perusahaan pialang menetapkan dikisaran Rp 3.500 – Rp 4.000 per gram. Jadi jauh lebih murah dibandingkan dengan 1 lot kontrak berjangka SPA yang mencapai ratusan ribu," terangnya.

"Peluang kedua, transaksi kontrak berjangka komoditi sampai saat ini belum ada keputusannya dari pemerintah untuk dikenakan pajak final. Di samping itu, pemilik dana TA baru dikenakan pajak setelah program ini berakhir tiga tahun kemudian," jelas Jacob.

"Jadi, kalau boleh saya saling *sharing* bagi perusahaan pialang berjangka, untuk dapat mengelola dan TA harus memahami betul berbagai kebijakan

yang terkait. Kemudian, mengenal betul spesifikasi kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan bursa berjangka. Dengan demikian akan memudahkan perusahaan pialang melakukan penetrasi kepada pemilik dana TA," ungkap Jacob.

Sosialisasi

Kunci sukses pelaku pasar industri perdagangan berjangka komoditi mengelola dana TA terletak pada intensifnya sosialisasi baik mengenai jenis kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan oleh bursa berjangka, maupun regulasinya.

Terkait itu, Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, Aspebtindo, F. Wishnubroto, mengatakan, dalam waktu yang tak lama kami akan mengumpulkan semua pelaku usaha untuk menjelaskan lebih detail regulasi dan potensi dana TA dikelola di industri perdagangan berjangka komoditi.

"Kalau diamati, Perka Bappebti No. 1 Tahun 2017, itu, sudah cukup detail mengatur pengelolaan dana TA di industri perdagangan berjangka komoditi. Namun kemungkinan pihak bursa berjangka dan lembaga kliring akan membuat kebijakan teknis. Nah, kami akan menunggu itu. Tetapi kalau pun tidak ada kebijakan lagi, Aspebtindo akan lakukan sosialisasi kepada pelaku pasar," ucap Wishnubroto.

Sementara itu, Direktur BBJ, Donny Raymond, mengatakan, sosialisasi Perka Bappebti No. 1 Tahun 2017, sudah dilakukan di dua kota. Yakni di Kota Makassar, Sulsel, bagi pelaku usaha yang berada di Wilayah Timur Indonesia. Kemudian di Kota Medan, Sumut, bagi pelaku usaha yang ada di Pulau Sumatera.

"Kalau melihat karakteristik pemilik dana TA, jenis kontrak berjangka komoditi berbasis emas merupakan kontrak yang tepat untuk ditransaksikan. Di BBJ ada banyak varian kontrak berjangka emas, oleh karena itu kami pun akan terus sosialisasikan kepada pialang berjangka agar dapat memasarkannya," ujar Donny Raymond. 

Kancab Pialang Berjangka Nasibmu Kini

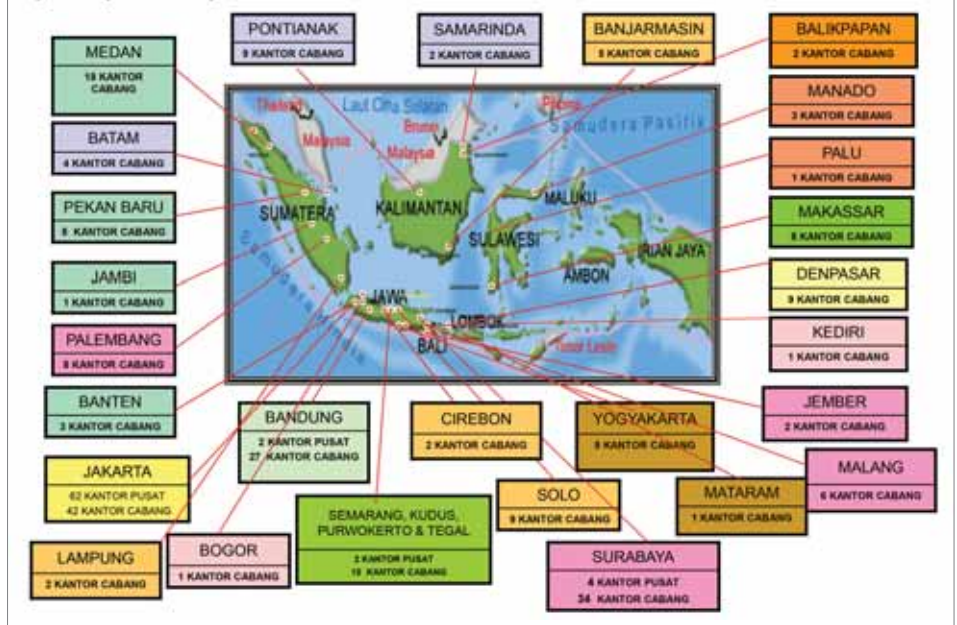
Surat Edaran Kepala Bappebti No. 49/BAPPEBTI/SE/03/2017, mempertegas penghentian sementara Kantor Cabang Pialang Berjangka berarti Pembatalan Persetujuan Kantor Cabang Pialang Berjangka (penutupan kantor cabang).

Teknologi informasi yang kian hari kian maju, berdampak pada rasionalisasi kantor cabang perusahaan Pialang Berjangka di sejumlah daerah. Akibatnya, sejumlah perusahaan Pialang Berjangka mengajukan izin permohonan untuk penutupan sementara kantor cabang kepada Bappebti.

Menurut Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan, mengacu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, ditegaskan bahwa Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti apabila akan menghentikan sementara kegiataannya.

"Lalu dalam penjelasannya, pengertian penghentian sementara dimaksud adalah penghentian sementara seluruh kegiatan usaha Pialang Berjangka, baik yang ada di kantor pusat maupun kegiatan di kantor cabang," tegas Sri Hariyati.

PETA SEBARAN KANTOR PIALANG BERJANGKA (Per April 2017)



Dengan demikian, tambahna, pada perizinan perusahaan Pialang Berjangka tidak dikenal penghentian sementara Kantor Cabang Pialang Berjangka, di mana kegiatan kantor pusatnya masih aktif.

"Oleh karena itu, Kepala Bappebti kembali mempertegas melalui Surat Edaran No. 49/BAPPEBTI/SE/03/2017, tentang Penghentian Sementara Kantor Cabang Pialang Berjangka," tegas Sri Hariyati.

Keluarnya Surat Edaran Kepala Bappebti itu, tambah Sri Hariyati, diharapkan masyarakat jeli untuk memeriksa perizinan perusahaan Pialang Berjangka untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. "Terutama Kantor Cabang Perusahaan Pialang Berjangka yang tersebar di sejumlah daerah," katanya.

Berdasarkan **database** Bappebti, hingga April 2017 jumlah perusahaan Pialang Berjangka sebanyak 61 perusahaan. Dari sebanyak itu, terdapat 1 perusahaan Pialang Berjangka berstatus non operasional dan 4 dibekukan. Sedangkan Kantor Cabang Pialang Berjangka berjumlah 237 unit. Untuk wilayah DKI Jakarta, terdapat sebanyak 102 baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Pialang Berjangka. 

Jelang Ramadhan

Pasokan Aman Harga Komoditi Pangan Cenderung Stabil



**Kementerian Perdagangan
atur strategi amankan
pasokan dan harga komoditi
pangan jelang ramadhan
2017 dan Idul Fitri 1438 H.**

Jelang ramadhan 2017 dan Idul Fitri 1438 H, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, terjun langsung memantau ketersediaan pasokan dan harga pangan ke sejumlah daerah. Di samping itu, kebijakan yang menjamin ketersediaan pasokan pun dikeluarkan. Terkait itu, seluruh pejabat Eselon I Kementerian

Perdagangan ditugaskan ke berbagai daerah untuk sosialisasi kebijakan dan memantau pasokan serta harga pangan.

Menurut Enggartiasto Lukita, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan pihaknya akan mengundang seluruh pejabat kabupaten/kota dari setiap provinsi. Selain itu, mengundang para pengusaha distributor pangan. "Dengan cara demikian, kita akan mendapat data yang faktual ketersediaan pangan," katanya kepada media baru-baru ini di Jakarta.

"Oleh karena itu, kita akan bikin aturan yang mewajibkan para distributor pangan melaporkan jumlah *stok*-nya. Dengan begitu, kita bisa memantau pergerakan

harga dan pasokan menjelang puasa nanti," terang Enggartiasto.

Lebih jauh dikatakan Enggartiasto, ketentuan wajib lapor itu akan disosialisasikan kepada pihak distributor pangan. "Karena itu seluruh pejabat di Kemendag ditugaskan untuk terjun ke berbagai provinsi," katanya.

Wajib lapor komoditi pangan itu mencakup lapor posisinya, posisi stoknya, dan demikian juga dengan harganya, lanjut Enggartiasto.

Strategi lain yang dijalankan Kementerian Perdagangan untuk meredam gejolak harga komoditi pangan yakni menetapkan batas atas pada harga

tiga bahan pokok yang dijual toko ritel modern. Masing-masing komoditi yang dimaksud yakni gula, minyak goreng dan daging beku.

“Toko ritel modern kita jadikan mereka sebagai *price leader*. *Price leader* ini yang kita kendalikan. Mereka tidak boleh menjual harga di atas harga yang ditetapkan. Seperti halnya gula dan sebagainya,” tegas Enggartiasto. Menurutnya, harga bahan pokok yang akan diatur untuk ritel modern itu yakni semua jenis gula paling tinggi Rp 12.500 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg, dan daging untuk jenis tertentu Rp 80.000 per kg.

DI Yogyakarta

Bappebti yang merupakan unit Eselon I Kementerian Perdagangan dalam kaitan pengamanan pasokan dan harga komoditi pangan jelang ramadhan dan Idul Fitri 1438 H, mendapat penugasan di dua provinsi yakni DI Yogyakarta dan Sorong, Papua Barat.

Kepala Bapebbti Bachrul Chairi bersama Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Bappebti, Retno Rukmawati, pada 18 April 2017, lalu, telah melakukan peninjauan ke Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam kunjungannya di Kota Pelajar tersebut, Bachrul Chairi didampingi pejabat pemerintah daerah melakukan kunjungan ke pasar tradisional, ritel modern dan beberapa gudang penyimpanan bahan pokok. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Pasar Beringharjo yang terletak di Jalan Pabringan, Yogyakarta. Dari hasil pantauan, diketahui harga gula pasir sudah sesuai target yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 12.500 per kg, sementara harga minyak goreng curah dijual dengan harga Rp 10.000 per liter dan minyak goreng kemasan Rp 13.000 per liter.

Sedangkan harga daging sapi segar relatif bervariasi, yaitu daging has dalam dan luar (kualitas I) Rp 120.000 per kg, daging bahan rendang (kualitas II) dijual dengan harga Rp 115.000 per kg, dan daging sop (kualitas III) dijual dengan



harga Rp 80.000 per kg.

“Dari hasil pantauan kami di Yogyakarta, harga kebutuhan pokok ada di bawah rata-rata nasional. Harganya cukup stabil dan pasokannya pun cukup,” ujar Bachrul kepada media.

Namun Bachrul Chairi menaruh perhatian pada pasokan cabai merah yang meningkat dan pasokan bawang putih yang kurang. “Disini kelihatannya kekurangan pasokan bawang putih. Kita akan komunikasikan dengan importir untuk menyuplai di daerah Yogyakarta,” ucapnya.

Setelah itu, rombongan mengunjungi Toko Segoro Amarto milik Tim Pengendali Inflasi Daerah- TPID DI Yogyakarta, disimpulkan toko tersebut sebagai pasar penyeimbang harga bahan kebutuhan pokok, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam.

Selanjutnya, Bachrul juga mengunjungi gudang milik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia- PPI dan Bulog di DIY. “Ketersediaan produk beras Bulog di Yogyakarta cukup untuk kebutuhan 3-4 bulan ke depan dengan jumlah persediaan sebanyak 23 ribu ton. Sedangkan stok gula pasir ada sebanyak 18 ribuan ton yang dapat memenuhi kebutuhan 3-4 bulan ke depan,” tambah Bachrul.

Wajib Daftar

Acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan perwakilan Bupati/Walikota se-DIY, Kapolda DIY, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan se-DIY, Kepala perwakilan Bank Indonesia DIY, Kepala Divre Bulog, Kepala PPI Cabang DIY, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait distribusi barang pokok di DIY serta pelaku distributor pangan DI Yogyakarta, Bachrul Chairi berkesempatan menjelaskan Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. “Keluarnya kebijakan ini dalam upaya menjaga stok dan stabilitas harga di masyarakat,” kata Bachrul.

Sebab itu, distributor sembako diminta segera mendaftarkan usahanya untuk mempermudah pemerintah memantau stok dan mengendalikan harga. “Distributor, subdistributor dan agen sembako wajib mendaftarkan usahanya,” terang Bachrul.

Lebih jauh dijelaskan Bachrul, setelah mendapatkan tanda daftar pelaku usaha distribusi, mereka diwajibkan melaporkan mengenai sembako yang akan disalurkan. “Setiap bulan mereka memiliki kewajiban melaporkan mengenai jumlah, harga, dan kemana saja bahan pokok akan disalurkan,” katanya.



"Jika ada pelaku distribusi sembako di DI Yogyakarta tidak bersedia mendaftar hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka mereka bisa dikenai sanksi administrasi seperti pembekuan dan pencabutan izin usaha," tegas Bachrul Chairi.

Sorong

Dalam kesempatan berbeda, Bachrul Chairi bersama Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, serta Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, melakukan kunjungan selama dua hari (26 - 27 April 2017), ke Kota Sorong, Papua Barat.

Di hari pertama kunjungan di Sorong, Bachrul bersama rombongan melakukan rapat koordinasi- Rakor untuk merangkul perangkat daerah setempat. "Rakor itu perlu dilakukan agar pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pusat. Rakor itu penting untuk mengantisipasi sedini mungkin terjadinya lonjakan permintaan yang bisa memicu kenaikan harga. Sebab pemerintah ingin memastikan stok barang pokok secara nasional aman dan harga stabil," papar Bachrul.

Selama di Kota Sorong, Bachrul dan rombongan berkesempatan memantau dua distributor barang pokok yaitu

CV. Tri Abadi dan PT. Mariat Utama. Kemudian dilanjutkan mengunjungi Pasar Sentral Remu yang merupakan pasar rakyat terbesar di Kota Sorong. Serta, mengunjungi gudang Perum BULOG Divre Papua dan Papua Barat.

Dari hasil pantauan Bachrul ke Pasar Sentral Remu, hasilnya cukup positif. Harga barang pokok di pasar tersebut stabil, bahkan ada sebagian barang tertentu yang turun, meski hampir seluruhnya berada di atas rata-rata harga nasional. Tercatat, harga daging ayam ras dijual Rp 33.000 per kg. Sedangkan harga cabe rawit merah Rp 100.000 per kg, dan bawang putih dijual Rp 60.000 per kg.

Sementara itu, pada komoditas daging sapi di wilayah Papua Barat justru berada pada kisaran harga Rp 110.000 per kg, lebih murah dibandingkan dengan harga rata-rata nasional senilai Rp 114.766 per kg. "Hal itu disebabkan konsumsi protein hewani di sini bukan berasal dari daging sapi, namun dari ikan dan daging ayam," terang Bachrul.

Adapun stok beras yang ada di Perum Bulog Divre Papua Barat sebanyak 15.700 ribu ton beras. Diperkirakan stok beras mampu mencukupi kebutuhan beras selama 5,5 bulan atau sampai dengan bulan September 2017.

Di samping itu, untuk stok gula di Perum Bulog Divre Papua Barat juga terpantau aman. "Stok gula di Divre Papua Barat ada sekitar 127 ton, yang akan terus ditambah lagi sebanyak 144 ton yang stoknya akan tiba pada April 2017," ungkap Bachrul.

Sedangkan dari kedua gudang distributor (CV Tri Abadi, dan PT Mariat Utama), ditemukan pasokan beras sekitar 75,6 ton dan gula sebanyak 70 ton yang akan disalurkan kepada para pedagang. Untuk persediaan gula akan ditambahkan sebanyak 72 ton dan masih dalam tahap pengiriman.

Sementara itu, dalam kunjungan rombongan di sejumlah pasar modern diantaranya, Supermarket Mega, Jupiter, dan Saga, diketahui tidak ada satu pun ritel modern tersebut yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia- Aprindo. Padahal, Kemendag sudah meminta ritel modern yang berada di bawah naungan Aprindo untuk melaksanakan kebijakan penetapan HET gula seharga Rp 12.500 per kg, daging Rp 80.000 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per liter. HET tersebut dilaksanakan serentak mulai 10 April 2017 hingga 10 September 2017.

Karena itu, Bachrul menyarankan agar pasar modern di Papua Barat mendaftar sebagai anggota Aprindo untuk lebih menjaga kestabilan harga. "Di Papua Barat, khususnya di Sorong ini memang tidak ada ritel modern yang merupakan anggota Aprindo. Oleh karena itu kami akan terus memantau kestabilan pasokan mencukupi, dan harga berada di tingkat yang terjangkau, meskipun tidak mengikuti kebijakan HET," jelas Bachrul.

Di samping itu, Bachrul juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menyosialisasikan dan melaksanakan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. "Permendag ini memberikan sanksi kepada pelaku usaha distribusi yang tidak melakukan pendaftaran, berupa rekomendasi pencabutan izin usaha," imbuh Bachrul Chairi. 



Royalti Timah BKDI Capai US\$ 117,8 juta

Bursa Timah yang diselenggarakan BKDI semakin menunjukkan eksistensinya. Indonesia sebagai produsen timah saat ini tidak lagi sebagai price taker, melainkan menjadi price setter.

Bursa Timah yang diselenggarakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI di tahun 2017, ini, terhitung telah empat tahun beroperasi sejak diluncurkan pada 30 Agustus 2013 silam. Hingga akhir tahun 2016, royalti atas perdagangan timah yang disetor ke negara telah lebih dari US\$ 117,8 juta atau

lebih dari Rp 1,52 triliun (dengan nilai tukar Rp 13.000 per dolar Amerika).

Sementara itu, ekspor timah hasil perdagangan di BKDI di tahun 2016 mencapai US\$ 1,141 miliar dengan volume transaksi sebesar 63.193,64 metrik ton. Nilai perdagangan timah di tahun 2016 itu memang sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai US\$ 1,154 miliar. Sedangkan total volume perdagangan timah mencapai 67.563,20 metrik ton. Penurunan perdagangan timah itu disinyalir akibat lesunya perekonomian global.

Melihat perkembangan Bursa Timah BKDI, Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, mengatakan, keberadaan Bursa Timah BKDI membuat posisi tawar Indonesia semakin tinggi di kancah perdagangan internasional. Hal itu dikatakan Nusa

Eka saat memberi sambutan di kegiatan sosialisasi dan evaluasi perkembangan industri dan tata niaga perdagangan timah murni batangan melalui BKDI. Kegiatan itu diselenggarakan pada 3 Maret 2017, di Kota Batam.

"Indonesia sebagai produsen timah saat ini tidak lagi sebagai *price taker* tetapi menjadi *price setter*," terang Nusa Eka.

Sebab itu, Nusa Eka, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dan berharap kegiatan itu dapat menjadi evaluasi untuk membangun perdagangan timah yang lebih baik di masa mendatang.

"Saya cukup yakin kelak Indonesia akan menjadi pusat perdagangan timah dunia. Hal itu jika kita bersungguh-sungguh dan konsisten mengembangkan Bursa Timah ini. Sebab dari informasi yang saya

peroleh, perdagangan timah BKDI sudah memperhitungkan kelestarian lingkungan dan dapat ditelusuri asal usulnya,” ucap Nusa Eka.

Senada dengan itu, Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, juga memaparkan pentingnya keberadaan Bursa Timah BKDI. Dikatakan Megain, Indonesia adalah negara produsen dan eksportir timah yang utama di dunia. “Komoditi timah merupakan mineral yang sangat strategis, karena tidak tergantikan dan tidak terbarukan,” katanya.

Sebab itu, tambah Megain, banyak pihak yang berlomba mengeksploitasi tambang timah tanpa menghiraukan kerusakan lingkungan. Akibatnya, terjadilah *illegal mining* dan *illegal trading*.

Dengan latar belakang tersebut, jelas Megain, kehadiran Bursa Timah BKDI memang sangat diperlukan. “Kami mempunyai visi utama yaitu terwujudnya pembentukan harga timah batangan di Indonesia sebagai referensi harga timah dunia,” paparnya.

Di samping itu, ada beberapa misi Bursa Timah BKDI. Diantaranya, pertama, tata kelola perdagangan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan akibat *illegal mining* secara masif dalam penerapan sertifikasi *clean and clear*- CnC.

Kedua, intensifikasi peningkatan pendapatan negara dari pembayaran iuran produksi- royalti dan penerimaan pajak negara. Ketiga, peningkatan nilai tambah timah dengan meningkatkan mutu timah yang disetor, serta peningkatan hilirisasi industri timah dalam negeri. Dan terakhir, menjadikan Bursa Timah BKDI sebagai tempat pembentukan harga dan acuan harga timah dunia.

Megain juga menjelaskan, Bursa Timah merupakan pasar terorganisir di mana terjadinya transaksi komoditi antara anggota penjual dan pembeli, sehingga harga yang terbentuk dipakai sebagai referensi harga di bursa. “Sebagai negara produsen, *benefit* dengan adanya Bursa Timah yaitu terbentuknya referensi harga yang wajar dan efisien, serta menopang hilirisasi industri,” papar Megain Widjaja. 

PERGERAKAN HARGA TIMAH ICDX DIBANDINGKAN DENGAN PASAR LAIN

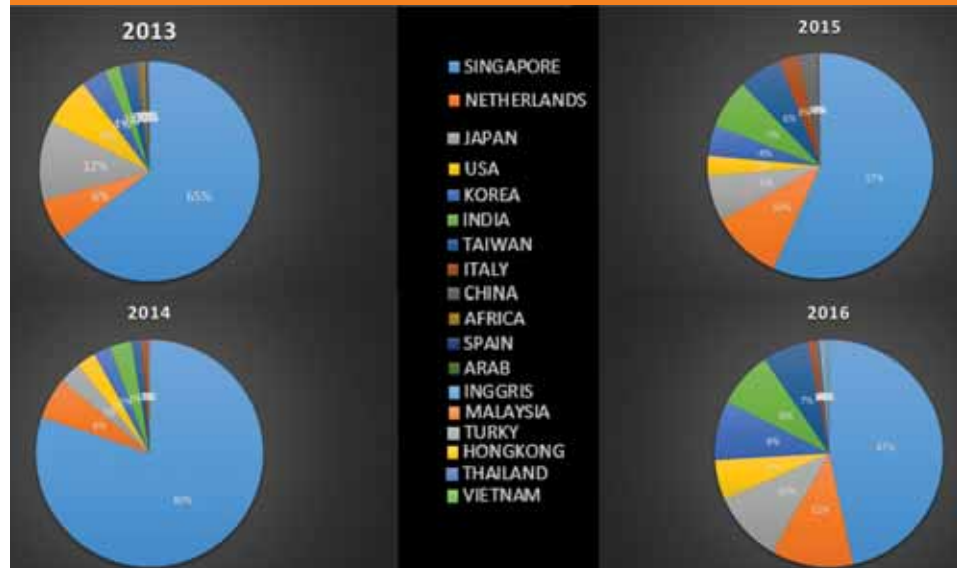
Perbandingan Harga Timah



PERGERAKAN VOLUME TRANSAKSI DAN EKSPOR TIMAH 2013-2016

PERIODE	TRADE (MT)	EXPORT (MT)	EXPORT (\$)	EXPORT (\$ Royalti)
30 Aug 2013-31 Dec 2013	18,288.56	18,078.44	418,713,575.01	12,561,407.25
01 Jan 2014-31 Des 2014	57,010.08	54,465.38	1,213,693,324.35	36,410,799.73
01 Jan 2015-31 Des 2015	67,563.20	69,853.23	1,154,140,086.37	34,624,202.59
01 Jan 2016-31 Des 2016	63,193.64	63,113.20	1,141,361,765.99	34,240,852.98
Total	206,055.47	205,510.25	3,927,908,751.72	117,837,262.55

TUJUAN TRANSAKSI DAN EKSPOR TIMAH 2013-2016





Mewujudkan kedaulatan pangan, OJK meluncurkan program AKSI Pangan dengan Sistem Resi Gudang- SRG sebagai salah satu instrumen pendukungnya.

SRG Ujung Tombak AKSI Pangan

Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sumatera Barat, pada 24 Maret 2017 lalu, menjadi 'saksi bisu' diluncurkannya program Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan di bidang pangan atau disingkat AKSI Pangan. Penggagas program tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan-OJK sebagai tindak lanjut 'Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat' yang diluncurkan Presiden RI, Joko Widodo di Brebes Jawa Tengah pada April 2016. Di sisi lain, program OJK itu juga bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif-SNKI yang juga diluncurkan Presiden RI pada November 2016.

Hadir dalam acara peluncuran AKSI Pangan itu antara lain: Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappebti Kemendag Bachrul Chairi yang mewakili Menteri Perdagangan serta sejumlah direksi lembaga keuangan BUMN dan pejabat pemerintah daerah.

Dalam rangkaian peluncuran AKSI Pangan itu, OJK juga menyelenggarakan **workshop** yang diantaranya mengambil tema tentang manfaat dan peran Sistem Resi Gudang terhadap ketahanan pangan. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Retno Rukmawati

menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D. Hadad mengatakan bahwa AKSI Pangan ini merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan, khususnya pada sebelas komoditi utama pangan.

"Diharapkan dengan AKSI Pangan ini dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan, khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan,"

papar Muliaman.

Muliaman juga berharap, program AKSI Pangan yang diluncurkan menjadi gerakan nasional dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan skema pembiayaan secara rantai nilai-**value chain financing** yang diharapkan menjadi momentum percepatan akses keuangan di sektor pangan.

Menurut Muliaman Hadad, dipilihnya Kab. Lima Puluh Kota sebagai pusat peluncuran AKSI Pangan dikarenakan daerah ini merupakan satu daerah yang berhasil menerapkan rantai nilai pertanian dari hulu ke hilir. Selain itu, daerah ini merupakan salah satu sentra peternakan sapi jenis Simmental. "Komoditas pertanian lainnya yang menjadi unggulan gambir dan kakao. Petani Payakumbuh pada tahun lalu juga menyabet penghargaan Adikarya Pangan Nusantara dan sebagai Pelopor Ketahanan Pangan," katanya.

"Karena itu, sekitar Rp 740 miliar penyaluran kredit di Sumatera Barat juga ke sini," kata Muliaman.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat- KUR ke sektor produktif mencapai sebesar 40 % dari total penyaluran KUR. "Tahun lalu, realisasi KUR yang disalurkan ke sektor pertanian hanya sebesar Rp 20,68 triliun atau sekitar 22 % dari total penyaluran KUR sebesar Rp 94 triliun," ungkap Darmin.

Melalui AKSI Pangan, di tahun 2017 ini ada sebanyak 19 bank partner menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan yang mencapai angka 14,12 % atau setara Rp 260 triliun. Asuransi usaha tani, premi dan luas lahan terlindungi akan meningkat 64,88 % menjadi Rp 180 miliar dan 1 juta hektar. Asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi akan meningkat 238,42 % menjadi Rp 27 miliar dan 120.000 ekor sapi. Penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42 % menjadi Rp 8,8 triliun. Serta penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44 % menjadi Rp 9,9 triliun.

Daya Saing

Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar yang juga hadir di peluncuran AKSI Pangan tersebut mengatakan, dalam rangka menyukseskan program AKSI Pangan, Perum Jamkrindo sebagai LPP-SRG sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 1 Tahun 2016, mendapatkan tugas untuk melindungi hak pemegang Resi Gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya.

"Melalui kebijakan tersebut, Jamkrindo ditunjuk menjadi satu-satunya perusahaan penjaminan yang menjamin SRG. Karenanya kami telah berkomitmen untuk pemberdayaan UMKM dan memelihara stabilitas dan integritas SRG yang ada di seluruh Indonesia," tegas Diding.

Lebih jauh dikatakan Diding, Jamkrindo siap mengakomodir penjaminan SRG, yaitu penjaminan kredit beragun Resi Gudang. "Pemberian jaminan Resi Gudang diharapkan mampu membantu meningkatkan kepercayaan petani maupun koperasi kepada SRG dan mempermudah mereka untuk dapat mengakses kredit dari bank dengan beragun Resi Gudang. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya saing petani sehingga mampu tumbuh menjadi usaha

yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar.

"Dengan adanya SRG maka akan mempercepat pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan petani, poktan, gapoktan dan koperasi. Untuk itu, penting kiranya adanya peningkatan akses pembiayaan dan mengembangkan petani dan koperasi kepada lembaga keuangan guna penanggulangan atau pengentasan petani dari sistem ijon," kata Diding.

Adapun komoditi yang bisa disimpan oleh pengelola gudang dalam rangka pelaksanaan SRG antara lain rotan, gabah, gambir, beras, teh, jagung, karet, rumput laut, kopi, kakao, timah, lada, kopra, dan garam.

Kredibilitas Jamkrindo sebagai lembaga mitra terpercaya dalam penjaminan memang sudah diakui dunia internasional. Dengan tagline Your TRUSTed Guarantee Partner ternyata Jamkrindo mampu menembus produk usaha mikro kecil dan menengah-koperasi (UMKM-K) Indonesia ke pasar Amerika Latin.

Di samping itu, Jamkrindo juga sangat serius untuk mengembangkan SRG di Indonesia. Satu bukti, perusahaan BUMN ini telah melakukan studi banding hingga ke Bulgaria dan India. "Kami telah melakukan studi banding ke India dan Bulgaria itu untuk mengkaji tentang manajemen SRG," imbuh Diding S. Anwar. 





Konsinyering Analisa Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Kepala Bappebti Bachrul Chairi membuka dan memberikan arahan pada acara Konsinyering Analisa Laporan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), di Jakarta, Senin (17/04). Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti Pantas Lumban Batu, dan Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan Bappebti Sri Hariyati.

Dalam arahnya, Bachrul meminta agar monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan pelaku usaha PBK harus sesuai aturan dan persyaratan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kemungkinan pelanggaran terhadap pengelolaan dana nasabah di bidang PBK.

Hadir dalam konsinyering ini adalah Pejabat Eselon III, IV dan staf terkait di Bappebti, Dirut PT Bursa Berjangka Jakarta, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (persero), Dirut PT Indonesia Clearing House dan perwakilan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia serta staf terkait sebanyak 40 orang. 📷



Bimtek Penyuluh Lapangan SRG



Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan SRG, di Hotel A One, Jakarta, Selasa, 4 April 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Perdagangan dan Penyuluh Pertanian/Perikanan Lapangan dari 13 kabupaten.

Dalam sambutannya, Bachrul memberikan gambaran kepada para peserta terhadap pelaksanaan SRG sebagai instrumen untuk mendapatkan pembiayaan suku bunga rendah dari lembaga keuangan dengan agunan komoditas.

Bimtek ini bertujuan memenuhi kebutuhan SDM yang memahami teknis pelaksanaan SRG, dan selanjutnya dapat melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya petani, kelompok tani/gapoktan dan UKM, yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan dan memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai SRG. 📷



Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Gudang SRG di Kabupaten Lebak

Kepala Bagian Program dan Pelaporan Bappebti, Subagiyo beserta Staf Bappebti melakukan kunjungan kerja ke gudang SRG yang terletak di Kabupaten Lebak, 6 April 2017 lalu. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi pembangunan gudang SRG di Kabupaten Lebak di lokasi yang baru, karena gudang SRG sebelumnya sudah tidak sesuai RUTRS.

Gudang SRG baru tersebut dibangun melalui dana APBD Kabupaten Lebak TA. 2016 sebagai pengganti dari gudang SRG yang dibangun tahun 2010 dari dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan TA. 2010, yang telah dihibahkan oleh Kementerian Perdagangan kepada Pemda Kab. Lebak pada tahun 2015.

Gudang SRG yang baru juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik berupa *Rice Milling Unit* (RMU), dan 1 unit truk serta alat pengering (*dryer*) dari pengadaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016. 📷



Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka



Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu, mewakili Kepala Bappebti, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka (WPB) Angkatan II Tahun 2017, di Kota Malang, 28 April 2017. Ujian Profesi WPB diikuti oleh 133 peserta yang berasal dari 29 perusahaan pialang berjangka.

Dalam pengarahannya, Pantas menyampaikan, WPB sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan nasabah, memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan industri PBK.

"Oleh karena itu, WPB perlu untuk terus memutakhirkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang diterbitkan Bappebti, pengetahuan umum dan wawasannya agar industri PBK dapat dilakukan secara profesional sesuai rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PBK," paparnya. 📷

IsDB Grup Dukung Bursa Timah BKDI US\$ 50 juta



Perdagangan fisik komoditi timah yang diselenggarakan BKDI mendapat dukungan dari *Islamic Development Bank*- IsDB Grup. Nota kesepahaman kerjasama itu telah ditandatangani kedua belah pihak pada November 2016, lalu. Diperkirakan realisasi kerjasama itu akan terwujud pada semester kedua tahun 2017, ini.

Demikian antara lain dikatakan Direktur BKDI, Megain Widjaja, kepada Buletin Bappebti, baru-baru ini di Jakarta. "Kerjasama itu diantaranya fasilitas pembiayaan kepada smelter timah yang bertransaksi di Bursa Timah BKDI," kata Megain.

"Jadi konsepnya, smelter timah harus menyimpan komoditinya di gudang yang berada di kawasan berikat. Nah, sebelum timah itu diperdagangkan di Bursa Timah untuk tujuan ekspor, IsDB akan memberi fasilitas pembiayaan. Konsepnya nyaris sama dengan Sistem Resi Gudang- SRG, tetapi ini dilakukan antara tiga pihak atau dikenal dengan *collateral management agreement-CMA*," jelas Megain.

Lebih jauh dijelaskan Megain Widjaja, IsDB Grup melalui anak usahanya *International Islamic Trade Finance Corporation-ITFC*, menjalankan bisnis itu secara syariah. Dan, ITFC telah siap menggelontorkan dana sebesar US\$ 50 juta. "Kerjasama ini saling menguntungkan masing-masing pihak, karena konsepnya syariah," katanya.

"Prediksi kami kerjasama itu bisa direalisasikan pada semester dua 2017, ini. Karena saat ini kawasan berikat yang dibangun PT ICDX Logistic Berikat- ILB masih dalam tahap pembenahan," pungkas Megain Widjaja. 

Bappebti Perpanjang Moratorium Izin Pialang SPA

Bappebti untuk kedua kalinya memperpanjang pembatasan perizinan baru bagi perusahaan pialang berjangka yang berorientasi pada perdagangan bilateral atau lazim disebut Sistem Perdagangan Alternatif- SPA. Pasalnya, Bappebti menghendaki pelaku pasar terkonsentrasi pada perdagangan kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan bursa berjangka. Dengan demikian bursa berjangka dapat menjadi acuan harga komoditi.

Perpanjangan moratorium izin pialang SPA ditetapkan Kepala Bappebti melalui Surat Edaran No. 51/Bappebti/SE/03/2017, tentang Perpanjangan Pembatasan Perizinan dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Kebijakan itu berlaku terhitung sejak ditetapkan pada 14 Maret 2017 hingga 15 Maret 2019.

Menurut Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan

Penindakan Bappebti, Sri Hariyati, perpanjangan kebijakan itu didasari beberapa faktor. Diantaranya, belum tersedianya sistem pengawasan tunggal perdagangan SPA dari pelaku pasar.

"Tetapi faktor yang paling mendasar adalah masih rendahnya volume perdagangan kontrak berjangka komoditi dibandingkan SPA. Maka itu, Bappebti pun dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan agar kontrak berjangka komoditi dapat ditingkatkan agar bursa berjangka menjadi sarana pembentukan harga," terangnya.

"Keluarnya kebijakan ini juga menjadi acuan pada Bappebti untuk terus membenahi perdagangan SPA, sehingga dapat terselenggara dengan teratur, wajar, efisien, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang ada," tegas Sri Haryati. 

Cetak Likuiditas Tinggi Anggota JFX-KBI Dianugerahi Penghargaan

Member *Gathering* Bursa Berjangka Jakarta- BBJ dan Kliring Berjangka Indonesia- KBI, yang diselenggarakan pada 30 Maret - 02 April 2017, di Hongkong - Shenzhen, Tiongkok, menjadi ajang penganugerahan kepada anggotanya yang berhasil mencatatkan volume transaksi terbesar sepanjang tahun 2016, lalu.

Acara ini diikuti sebanyak 91 peserta yang terdiri dari Direksi BBJ, KBI, Anggota BBJ-KBI dan bank penyimpan margin *China Construction Bank- CCB*.

Perusahaan pialang berjangka yang berhasil mencetak volume terbesar untuk perdagangan kontrak multilateral di

tahun 2016, yakni PT Inter Pan Pasifik Futures. Selanjutnya di posisi kedua diraih PT International Business Futures dan ketiga PT Pruton Mega Berjangka.

Sedangkan untuk kontrak bilateral, volume terbesar disabet PT Soegee Futures, kemudian di posisi kedua PT Bestprofit Futures dan di posisi ketiga PT Valbury Asia Futures.

Sementara itu, Anggota Pedagang Penyelenggara SPA yang berhasil menciptakan volume transaksi terbesar di tahun 2016, berturut-turut diraih PT Royal Assetindo, PT Menara Mas Investindo dan PT Halim Mitradata Internasional.

BBJ Luncurkan Dua Produk Emas



Bursa Berjangka Jakarta- BBJ kembali mengeluarkan dua produk baru kontrak berjangka, yakni Kontrak Derivatif Emas Loco London dan Kontrak Berjangka Indeks Emas- KBIE. Kedua kontrak tersebut resmi melantai di BBJ pada 03 April 2017.

Dirut BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan, sebelumnya BBJ sudah memiliki produk serupa, yakni Kontrak Gulir Indeks Emas- KGIE yang bisa diperdagangkan 3 bulan berturut-turut. "Namun sesuai permintaan pasar, dibuatlah KBIE yang mengakomodasi perdagangan dalam 12 bulan berturut-turut," katanya.

"Adanya perpanjangan masa perdagangan membuat pasar bisa melakukan *hedging* dengan lebih baik," terang Paulus, baru-baru ini.

Sementara itu, Isa Abiyasa Djohari, *Research & Business Development Division Head* BBJ, dalam penjelasannya mengatakan, sebagai salah satu alternatif lindung nilai dolar AS, kontrak berjangka indeks emas menjadi salah satu pilihan. Pasalnya, pergerakan harga indeks emas cenderung serupa dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Jangka waktu 3 bulan dinilai terlalu pendek, karena pasar menginginkan rentang waktu antara 3—12 bulan. Jadi bisa dibilang ini hanya perubahan minor," katanya.

Di sisi lain dijelaskan Isa, Kontrak Derivatif Emas Loco London harganya akan mengacu kepada harga emas yang diambil dari Reuters di New York. Kontrak ini memiliki tiga varian, yakni Loco London Floating, fixed IDR Rp10.000, dan fixed IDR Rp12.000.

"Dari penjajakan pasar, ada investor yang ingin transaksi perubahan atas nilai emas dan ada juga yang tidak mau repot dalam USD, maka dia pakai yang fix. Umumnya pakai di Rp10.000, tapi ada yang pakai *floating*. Jadi intinya, tergantung selera market," ucap Isa Abiyasa Djohari.

Akindo Prediksi Harga Kedelai Stabil Selama 2017

Asosiasi Kedelai Indonesia- Akindo memperkirakan harga kedelai berpotensi stabil dan tidak mengalami gejolak besar sampai akhir tahun 2017. “Kalau pun ada gejolak, kemungkinan itu ada perubahan nilai tukar kurs yang ekstrem,” ujar Ketua Akindo, Yusan, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, selama triwulan pertama 2017 ini, harga kedelai impor relatif stabil. Saat ini, harga kedelai di gudang para importir rata-rata antara Rp 6.300 per kg. Stabilitas harga kedelai ini diperkirakan akan berlangsung sampai bulan ramadhan dan pasca lebaran.

Yusan juga bilang, selama beberapa bulan terakhir ada tren penurunan harga kedelai. Hal itu dikarenakan produksi kedelai terjaga baik di daerah asalnya Amerika Serikat dan Amerika Latin. “Panen raya kedelai di Amerika Serikat dan Amerika Latin diperkirakan pada bulan September mendatang,” katanya.

Menurut Yusan, faktor China juga yang turut memengaruhi kestabilan harga kedelai karena negara ini merupakan importir terbesar kedelai dunia dengan rata-rata mengimpor 83 juta ton kedelai per tahun.

“Tapi saat ini, China tidak menunjukkan gelagat untuk menaikkan pembelian kedelai, justru ada potensi mengurangi meskipun jumlahnya kecil,” pungkasnya. 



Harga Karet Tertekan Minyak Dunia

Harga karet alam di pasar internasional terus berfluktuasi dengan kecenderungan menurun sejak Maret lalu. Menurut Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia- Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, hal itu disebabkan oleh lemahnya harga minyak mentah dunia.

Irwansyah mengungkapkan, pada awal tahun 2017, khususnya Januari hingga Februari, harga karet sempat menembus level US\$ 2,4 per kg, namun kini seret ke level US\$ 1,56 per kg.

“Penurunan harga karet ini mulai terjadi sejak Maret dan masih berlangsung hingga saat ini,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Irwansyah, pergerakan harga karet mulai mendekati level terendah yang terjadi dalam kurun waktu 2014 hingga pertengahan 2016. Di mana saat itu, harga karet tak mampu menembus angka US\$ 1,5 per kg. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian. Begitu juga dengan petani yang mulai tak bersemangat menderes karet.

Sementara itu, harga getah karet di tingkat petani saat ini hanya mampu bermain di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 9.000 per kg, turun dari sebelumnya yang menembus angka Rp 11.000 per kg. 



The Auction Market of Refined Crystal Sugar Cuts Distribution Links



Ministry of Trade has established new policy regarding refined crystal sugar that was processed from imported raw sugar. This policy was stated on Permendag No.16/2017 on refined crystal sugar (RCS) trading using Commodity Auction Market. According to Ministry of Trade, Enggartiaso Lukita, this policy's aim is to cut distribution link and local sugar distribution

to that it can suppress the price at consumer's level.

"This policy was issued to guarantee and maintain supply, distribution, and stabilization of national sugar price, and also to give equal business opportunity for big and small industries to get RCS," Enggartiaso Lukita explained to media recently in Jakarta.

It's expected that by auction mechanism, the price for food and drink industry level will be more affordable. This policy will make RCS producer who imported raw crystal sugar obligates to sell their product via auction market. However, the execution of auction market on RCS commodity was set by Ministry of Trade.

On the other side Enggartiaso Lukita also emphasized that the policy is not applicable of RCS industry for export purpose. "So that this policy only for RCS consumption need inside the country," He said.

On the RCS auction implementation, Ministry of Trade will establish regularly the lower and upper border of selling price. This regulation aim is to simplify the accountable and accurate sugar monitoring. This RCS trading has been equipped by electronic barcode or e-barcode and was done through one gate via online auction market.

As the record, by the launching of Permendag No.16 Year 2017, therefore the conditions on Agreement letter of inter-island trade on refined crystal sugar (SPPA RCS) in Permendag No.74/M-DAG/PER/9/2015 in regards to RCS inter-island trade has been revoked and declared as invalid. 📌

Private Sector is Interested More on Organizing Commodity Auction Market

Coftra all this time was only seen to develop and monitor the Commodity Auction Market (CAM) that was held by local government. In reality, there are some private sectors that become the administrator of CAM. They are iPASAR Indonesia Pty Ltd, Meukat Komudity Gayo Pty Ltd, Pos Indonesia Pty Ltd, Asia Commodity Marketplace Pty Ltd, Bahtera Komodity Indonesia Pty Ltd and Pasar Komoditas Jakarta Pty Ltd among others. Besides those, there are 2 clearing institute and guarantor

Head for Bureau of Warehouse Receipt System and Commodity Auction Market Founding and Surveillance, Retno Rukmawati, said that the growth of private sector interest on organizing auction market is describing that there are requirements of commodity price referral inside the country. "Therefore, we really appreciated the entry of private sector in CAM area," Retno explained.

"Nowadays, Coftra is still doing a research on one proposal

of submission of permit issuance of CAM organizers. This proposal also came from private sector," She said.

In addition of private actors, there is cooperative law association as CAM organizer. They are the Union of Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, Pasar Lelang Jawa Barat, Pusat Komoditi and Pasar Lelang Agro (PUSKOMPAS) Sulawesi Selatan. This CAM organizer was originally started from auction execution that was held by trading service in each area. "There are also auction market organizer that has become Pty Ltd which is Puspa Agro Pty Ltd in Sidoarjo. This company was sponsored by East Java trading service," Retno said.

Besides that, in 2017, Coftra was planned to revitalize 9 local CAM so they can become professional and independent. The 9 local CAM are from West Sumatera Province, Jambi, Lampung, DI Yogyakarta, Bali, North Sulawesi, Gorontalo, Southeast Sulawesi, and West Nusa Tenggara. 📌



Zumroh, Jember, Jatim (46)

0852210xxxxxx

Tanya;

Kepada Yth Bappebti

Beberapa waktu belakangan ini cukup banyak pemberitaan yang mengulas tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Jamkrindo. Pertanyaan kami, bagaimana teknis penjaminan Jamkrindo terhadap SRG.

Jawaban:

Yth. Ibu Zumroh, penunjukan Perum Jamkrindo sebagai pelaksana penjaminan SRG berdasarkan PP No. 1 Tahun 2016, tentang, lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang. Dan dalam pelaksanaannya, Jamkrindo menjamin hak-hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan terhadap kelalaian, kegagalan, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya.

Adapun komoditi yang bisa disimpan oleh Pengelola Gudang dalam pelaksanaan SRG, yaitu komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, timah, kopra, gambir dan teh. Total gudang yang telah mendapat persetujuan sebagai gudang SRG yakni sebanyak 120 di 19 provinsi. Dengan penjaminan Jamkrindo itu, diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan pelaku usaha baik pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, perbankan maupun kalangan dunia usaha.

Lebih sederhananya lagi, Jamkrindo bertindak layaknya Lembaga Penjaminan Simpanan- LPS pada industri perbankan.

Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Convergence

The tendency for prices of physicals and futures to approach one another, usually during the delivery month. Also called a "narrowing of the basis".

2. Conversion

When trading options on futures contracts, a position created by selling a call option, buying a put option, and buying the underlying futures contract, where the options have the same strike price and the same expiration.

3. Corn-Hog Ratio

See Feed Ratio.

4. Corner

(1) To corner is to secure such relative control of a commodity or security that its price can be manipulated; (2) In the extreme situation, obtaining contracts requiring delivery of more commodities or securities than are available for delivery.

5. Cornering

Buying so much of a commodity or security that a degree of control over its price is achieved. This practice is illegal in The Malaysian futures and options market.

6. Cost of Tender

Total of various charges incurred when a commodity is certified and delivered on a futures contract.

7. Cost-of-Carry

The cost built-in to the price of a forward item it includes the interest rate and any other receipts built-in to a forward price. Also known as the 'carrying charge'.

8. Counter-Trend Trading

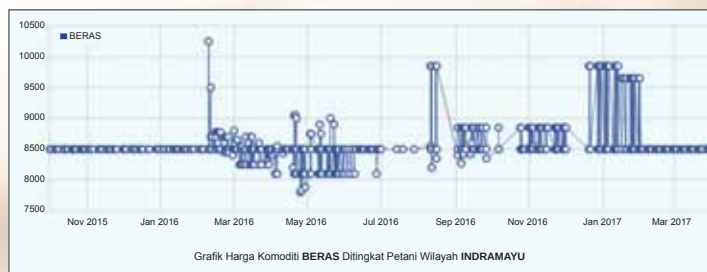
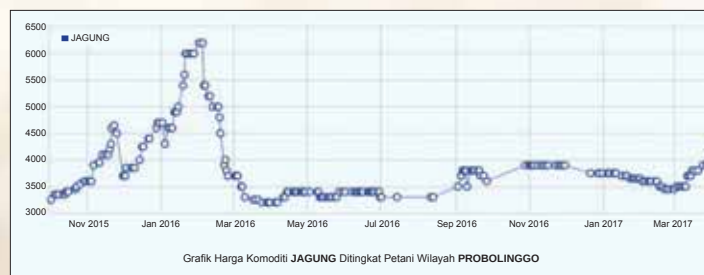
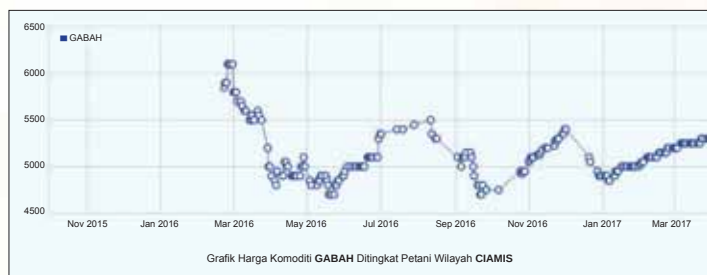
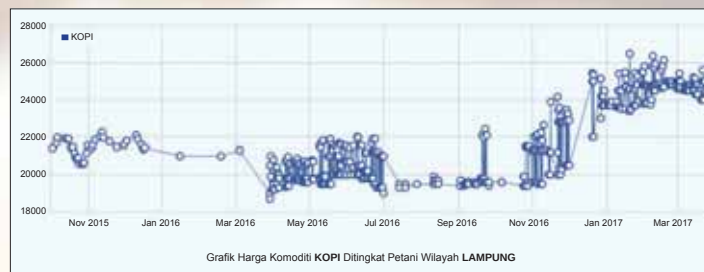
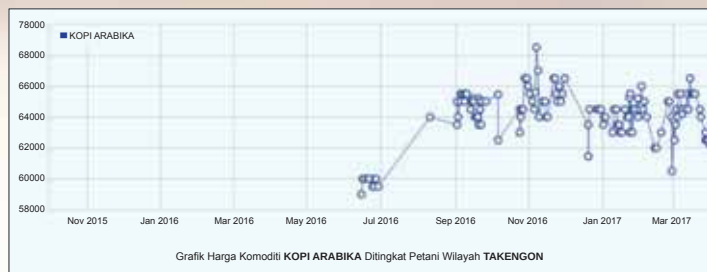
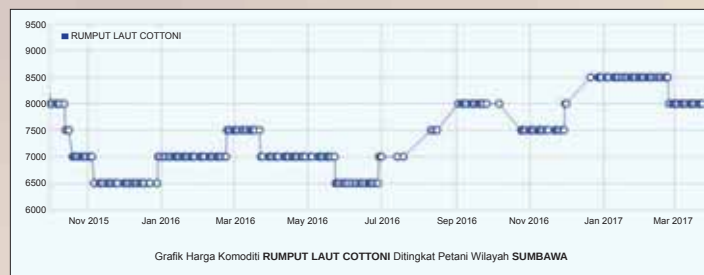
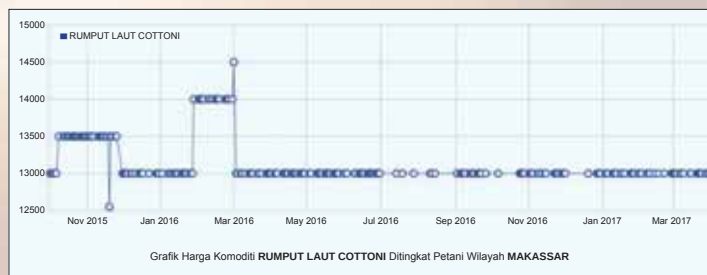
In technical analysis, the method by which a trader takes a position contrary to the current market direction in anticipation of a change in that direction.

9. Counterparty

The agent on the other side of a contract.

10. Coupon (Coupon Rate)

A fixed dollar amount of interest payable per annum, stated as a percentage of principal value, usually payable in semiannual installments.



Sumber : BAPPEBTI
<http://infoharga.bappebti.go.id/>

Informasi Harga Komoditi Melalui SMS

Informasi harga komoditi juga dapat dengan mudah diperoleh dengan mengirim SMS ke SMS Center Info Harga Bappebti.

SMS request informasi harga ditulis dengan format
HARGA#[NAMA_KOMODITI]#[NAMA_DAERAH]
 dan dikirim ke nomor

0812 1867 8000

Contoh : HARGA#BERAS#INDRAMAYU

SRG Objek Kajian Ilmiah

Bagian
III





Jelang Ramadhan

Pelaku Usaha Proaktif Hedging

*) TUMPAL SIHOMBING

Awal Ramadhan sudah dekat. Selain tiket angkutan mudik dan antisipasi jalur mudik alternatif, tak banyak terdengar hiruk-pikuk masyarakat mengenai aktivitas selama bulan suci bagi umat muslim tersebut. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, perubahan aktivitas selama bulan Ramadhan berdampak cukup besar. Dari perspektif perdagangan umumnya terjadi peningkatan permintaan bahan pangan dalam periode tersebut. Selama 1(satu) bulan, banyak yang cenderung membuat masakan yang lebih istimewa dibanding hari-hari biasa. Peningkatan permintaan pasar selama Bulan Ramadhan telah berdampak pada kenaikan harga-harga.

Saat di Indonesia perdagangan masih terlihat biasa, berbeda halnya dengan perdagangan di Eropa. Harga minyak sawit di pasar Eropa telah mulai bergerak naik sebagai wujud antisipasi potensi kenaikan harga selama bulan Ramadhan. Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang membutuhkan tambahan stok dari impor minyak goreng telah mulai melakukan order ke negara eksportir(produsen). Pihak-pihak yang mensuplai stok minyak goreng di Eropa telah mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut dengan melakukan pembelian dini. Semakin mendekati periode Ramadhan, potensi kenaikan harga akan semakin besar.

Yang menarik adalah adanya aktivitas antisipasi terhadap potensi kenaikan harga. Pelaku pasar di Eropa sudah hiruk pikuk mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak sawit lebih dari enam minggu sebelum puasa dimulai.

Dua negara penghasil terbesar minyak sawit dunia memiliki mayoritas penduduk muslim. Mendekati Ramadhan, harga minyak sawit di kedua sumber ini berpotensi menguat. Aktivitas di bursa-bursa luar negeri sudah menggeliat menghadapi Ramadhan. Para pelaku pasar berusaha melakukan lindung nilai dengan pembelian dini sebelum harga bergerak lebih tinggi.

Bagi pelaku pasar, keterlambatan melakukan lindung nilai dari potensi lonjakan harga bisa berakibat pada kerugian yang besar.

Lindung nilai- *hedging* berdampak efektif bagi kelangsungan usaha. Umumnya *hedging* atas potensi pergerakan harga yang merugikan bisa dilakukan dengan membuat kontrak. Hal itu bisa



dilakukan dengan kontrak *forward*, bisa juga dengan kontrak berjangka- *futures* yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Produsen cenderung menghindari diri dari menjual pada saat harga relatif rendah, sementara pihak yang melakukan pembelian membeli justru bertindak sebaliknya. Melalui *futures*, produsen dapat melakukan penjualan sebelum harga bergerak turun, sementara pembeli juga bisa memanfaatkan *futures* untuk bersikap proaktif sebelum ada kenaikan harga. Dengan melindungi nilai bisnis dari kondisi harga yang *unpredictable*,

Hedging dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila banyak pelaku pasar di industri yang melakukan hedging secara proaktif, maka kelangsungan industri juga bisa lebih terjaga.



maka bisnis dapat mengoptimalkan **margin profit**. **Hedging** bisa menghindari bisnis dari potensi kerugian. Di lain sisi, **sustainability** usaha juga bisa tercapai.

Kontrak Olein

Indonesia memiliki Bursa Berjangka Jakarta- JFX. Di bursa ini, ada 2 (dua) jenis kontrak minyak goreng yang diperdagangkan (olein/palm olein), yaitu kontrak berjangka Olein 20 ton (OLE20), dan kontrak berjangka Olein 10 ton (OLE10).

Melalui kontrak tersebut, masyarakat dapat bersikap proaktif antisipatif dalam menghadapi potensi kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadhan mendatang, terutama potensi kenaikan harga olein.

Para pedagang pasar berkesempatan membeli kontrak minyak goreng sebelum harga melonjak naik. Mereka dapat memilih untuk membeli kontrak olein yang jatuh tempo saat Ramadhan mendatang. Dengan demikian saat para pedagang tersebut membutuhkan tambahan stok minyak goreng, mereka telah memegang kontrak yang telah dibeli jauh hari sebelumnya. Pedagang tidak perlu membeli stok minyak goreng saat **demand** pasar tinggi.

Hedging dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila banyak pelaku pasar di industri yang melakukan **hedging** secara proaktif, maka kelangsungan industri juga bisa lebih terjaga.

Indonesia membutuhkan lebih banyak pelaku usaha yang secara proaktif melakukan **hedging**. Petani dapat menghindari rendahnya harga saat panen raya, manufaktur dapat memastikan biaya produksi yang lebih efisien melalui mitigasi risiko harga bahan baku, pedagang dapat memanfaatkan posisi jual dan/atau beli di bursa dalam rangka memperoleh harga terbaik.

Dalam periode menjelang Ramadhan dan Lebaran, harga bahan pangan termasuk minyak goreng (olein) diperkirakan akan lebih fluktuatif seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan minyak sawit dunia.

Bursa Berjangka Jakarta senantiasa berusaha memasyarakatkan aktivitas lindung nilai bagi semua pihak, terutama pelaku usaha.

Sehingga dalam rangka lebih mendorong perdagangan dan aktivitas **hedging**, Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia Persero memanfaatkan periode ini untuk menyelenggarakan kompetisi perdagangan untuk kontrak OLE10. Peluang inilah yang dapat dimanfaatkan para pelaku pasar dalam rangka mengantisipasi **event** Ramadhan dengan **hedging** secara proaktif. 📌

***) Corporate Secretary JFX**

Rita Sagita

From Loser to Winner



Masa suram bisnis perdagangan berjangka tak membuat tekad Rita Sagita surut. Dengan menimba ilmu, posisi pucuk pimpinan perusahaan pialang telah digapainya. Motivasi hanya untuk 'sebuah nama.'

Mungkin tak pernah terlintas di benak Rita Sagita untuk berkecimpung di industri PBK. Sebab di tahun 1995 silam, wanita yang akrab disapa Rita ini, sudah asik bergelut bisnis properti di sebuah perusahaan pengembang yang sedang berkembang pesat di masa itu. Apalagi, *basic*-nya sebagai sarjana arsitektur sangat mendukung untuk meraih kesuksesan di bisnis properti.

"Tahun 1995 sampai 2000, saya bekerja di perusahaan properti, terakhir jadi manajer marketing. Tapi kemudian saya juga sempat beralih menjalankan usaha keluarga di bidang travel," ujar Rita Sagita yang ditemui **Buletin Bappebti** di ruang kerjanya baru-baru ini.

Di tahun 2002, Rita kembali bekerja di perusahaan properti yang berbeda. Dia menjadi manajer proyek yang menggarap pembangunan sebuah supermarket di Bandung, dan sebuah perumahan elit di Jakarta.

Bergaul dengan seprofesi marketing dari berbagai industri, wanita yang selalu riang ini pun akhirnya mengenal industri perdagangan berjangka komoditi. Dia pun mencoba peruntungan dengan mengelontorkan dana dalam jumlah yang lumayan besar. Namun, bukannya untung yang dia dapat tapi malah buntung.

"Saat itu saya sama sekali tak mengerti dengan bisnis perdagangan berjangka. Dan, saya sangat percaya dengan janji-janji pihak perusahaan pialang berjangka tempat saya berinvestasi," kenang wanita kelahiran Pontianak, 7 April ini.

Tetapi ternyata saya dikerjain, tambahna. Kerugian saya pun mencapai miliaran rupiah. "Itu semua uang pribadi 'loh. Kalau tadinya itu uang orang lain, 'wah mungkin saya sudah dipenjar,' selorohnya dengan senyuman khas.

Apakah Rita Sagita kapok dengan kerugian sebesar itu? Justru dengan peristiwa itu dia mencari tahu apa penyebabnya sampai merugi.

"Tekad saya saat itu, kerugian harus kembali. Maka saya pun memperdalam ilmu dan pengetahuan di bisnis perdagangan berjangka dunia. Saya bela-

belain belajar sampai hingga ke Singapura dan Hongkong,” ucapnya.

Merasa sudah memiliki pengetahuan yang cukup, di tahun 2005 wanita **single parent** ini memutuskan bergabung di sebuah perusahaan pialang berjangka. “Tadinya harapan saya uang kerugian itu bisa kembali setelah bekerja di perusahaan pialang. Eh, malah karir saya yang menanjak terus,” ujarnya bersemangat.

Masa suram itu pun akhirnya dilupakan ibu satu anak ini. Maka karirnya pun terus berkembang. Tahun 2006, dia dipinang sebuah perusahaan pialang dan dipercaya menjadi **vice president**. Selanjutnya di tahun 2010, dia berganti ‘bendera’ dan menempati posisi direktur utama. Kemudian di tahun 2016, Rita Sagita melabuhkan pilihannya bergabung dengan PT. Kresna Investa Futures- Kresna.

“Dari semua peristiwa itu, satu hal yang disyukuri saat ini adalah anak saya sudah menyelesaikan pendidikannya di Australia. Dan rencananya akan melanjutkan pendidikan S2 di London, Inggris. Untuk dia ‘lah perjuangan saya terus berkarir di industri ini. Tanpa dia tak tahu apa yang terjadi pada diriku ini,” ucapnya dengan nada bergetar.

Multilateral

Bicara tentang Kresna, wanita lulusan Magister Manajemen Univ. Tarumanegara, ini, menjelaskan, di bawah kepemimpinannya Kresna akan terus berupaya eksis menjadi pialang terdepan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukannya yaitu dengan menggenjot transaksi kontrak multilateral. Sebab, dia menyadari bahwa kontrak multilateral menjadi penentu keberhasilan industri perdagangan berjangka di masa depan. “Kita tak bisa terus menerus mengandalkan Sistem Perdagangan Alternatif- SPA. Karena pasarnya pasti akan mengalami kejenuhan,” ujarnya.

Dia juga bilang, transaksi kontrak multilateral di Kresna cukup membanggakan. Produk yang menjadi andalan yaitu kontrak emas ukuran 250 gram. “Transaksinya cukup tinggi di



sepanjang tahun 2015, lalu. Dan Kresna mendapat penghargaan dari Jakarta Futures Exchange- JFX karena berada di peringkat pertama volume transaksi multilateral,” jelas Rita.

Menurut Rita, kontrak berjangka emas cukup mudah dijual dibandingkan dengan kontrak lainnya. “Sebab masyarakat sudah sangat familiar dengan investasi emas,” katanya.

Di sisi lain, ibunda dari Giory Harliandy (22), ini, juga bertanggungjawab terhadap pencapaian visi dan perusahaan. “Kami bertekad menjadikan Kresna sebagai perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia yang memadukan keunggulan global dengan kecerdasan lokal. Karenanya, kenyamanan para nasabah menjadi prioritas utama bagi Kresna dalam menjalankan bisnisnya,” terang Rita.

Sosialisasi dan Edukasi

Bagi Kresna, ucap Rita Sagita, sosialisasi dan edukasi adalah hal mutlak. Karena itu Kresna secara rutin menggelar beragam pelatihan. Pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan perusahaan dalam perdagangan berjangka, serta dibuat secara berkala dan terencana.

“Pelatihan ada yang untuk internal karyawan, dan ada juga pelatihan untuk nasabah dan calon nasabah melalui

seminar dan **workshop**,” terang Rita.

Dengan itu, masyarakat dapat mengetahui bahwa perdagangan berjangka tidak hanya berpotensi memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga berisiko tinggi. Jadi, jelas Rita, calon nasabah yang ingin berinvestasi di perdagangan berjangka harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami proses dan prosedur perdagangan berjangka, serta mengerti isi dari perjanjian pembukaan rekening.

Di samping itu, Kresna juga ikut berpartisipasi dalam pojok bursa atau dikenal **Futures Trading Learning Center-FTLC** yang digagas JFX. Rita menilai, FTLC akan menjadi salah satu pusat kegiatan pembelajaran dan pemahaman dini perihal industri perdagangan berjangka bagi para mahasiswa.

“Dalam waktu dekat, rencananya Kresna akan melakukan kerjasama dengan Universitas Kristen Indonesia-UKI Jakarta untuk membuka FTLC. Harap besarnya, dua atau tiga tahun ke depan ada alumnus UKI yang profesional di bidang perdagangan berjangka dan berkarier di industri ini,” papar Rita Sagita.

Keseimbangan

Meski sudah cukup padat dengan berbagai kegiatan di perusahaan dan industri perdagangan berjangka, Rita Sagita tetap tidak meninggalkan bidang ilmu arsitektur yang digelutinya dibangku kuliah.

“Di waktu luang, saya tetap berkreasi dan mendesain produk-produk interior dan eksterior. Hasil desain itu saya tawarkan kepada teman yang ada di Eropa untuk dijual, kebetulan teman itu punya perusahaan jasa desain yang dipasarkan secara **online**,” tutur Rita.

Uniknya, produk-produk yang ditawarkan di perusahaan teman itu banyak diminati para turis yang berkunjung ke Pulau Bali, tambahna.

“Jadi bagi saya bidang arsitektur itu sebagai hobi dan selingan yang dapat menjaga keseimbangan pikiran,” pungkas Rita Sagita. 📌

Customer Due Diligence Uji Tuntas Nasabah

Tindakan Pialang Berjangka



Identifikasi



Verifikasi



Pemantauan

(Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016)

www.bappebti.go.id